

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN

Soedjatmiko^{1*}, Regi Refian Garis², Ii Sujai³, Neti Sunarti⁴, Agus nurulsyam Suparman⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : soedjatmiko159@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan. 2) Alat berupa Printer, Scanner, *Uninterruptible Power Supply* (UPS) sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan. Tenaga profesional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator masih kurang. 3) Kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi langsung dari hasil wawancara dari 9 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh indikator – indikator pada dimensi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dokumen Kependudukan Terintegrasi

ABSTRACT

The background of this research is the not yet optimal Implementation of Integrated Population Document Service Policy by the Department of Population and Civil Registration of Pangandaran Regency. The purpose of this research is to find out the Implementation of Integrated Population Administration Document Service Policy by the

Department of Population and Civil Registration of Pangandaran Regency. The indicators of the problems in this study are as follows: 1) Procurement of telecommunications infrastructure is still very limited to fulfill population services, currently there is only 1 (one) server (with the help of the Central Government), if a problem occurs it can disrupt the total service. 2) Tools in the form of Printers, Scanners, Uninterruptible Power Supply (UPS) are very limited, if there is damage, there will be delays in the service process. Professional staff in the field of computerization and executors/operators are still lacking. 3) Geographical conditions that spread to sub-districts or villages and of course there are still limited funds in procuring the infrastructure. The research uses a descriptive method that describes the condition of the object of research, meaning that the author describes the current situation at the research location/object, namely at the Population and Civil Registry Office of Pangandaran Regency. The source of data in this study is primary data, namely direct information from interviews with 9 (nine) people. Data collection techniques used in this study include observation, interviews, documentation and triangulation. The data analysis technique used is Data Collection, Data Reduction, Data Display, Verification and Confirmation of Conclusions. The results of this study indicate that knowing the Implementation of the Integrated Population Administration Service Policy by the Population and Civil Registration Office of Pangandaran Regency has been running but not optimal, this is caused by indicators on the dimensions of resources, dispositions and bureaucratic structures that have not gone well.

Keywords : Policy Implementation, Integrated Population Documents

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Agar Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar yuridis penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, berikut adalah data kependudukan Kabupaten Pangandaran per kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.1

Data Kependudukan Per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Pendduk
1	Cimerak	49,190
2	Cijulang	27,750
3	Cigugur	22,800
4	Langkaplancar	50,990
5	Parigi	46,230
6	Sidamulih	29,810
7	Pangandaran	58,300
8	Kalipucang	38,290
9	Padaherang	68,120
10	Mangunjaya	32,200
Jumlah		423,670

Sumber: Data Penelitian 2022

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sejumlah 423,670 jiwa, yang tersebar di beberapa kecamatan. Yaitu di wilayah Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang dan Mangunjaya.

Dalam upaya peningkatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, masih adanya masalah dalam implementasi kebijakan dokumen kependudukan dan pelayanan publik, seperti implementasi kebijakan belum memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, perbedaan persepsi diantara pegawai atau bidang dalam penerapan kebijakan dan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan yang belum sesuai dengan harapan..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, berorientasi bagi

pelayanan kepada masyarakat, berproses pada kegiatan administrasi kependudukan yang melibatkan berbagai pihak secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi sampai ke pusat secara simultan terkoordinasi dengan jelas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan “bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu melaksanakan tertib administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk Kabupaten Pangandaran. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya..

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2015: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Konsep Dokumen Kependudukan

Menurut Sudjarwo, (2004 : 75) menyatakan bahwa:

Dokumen kependudukan diartikan sebagai pelayanan di bidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan nonpemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan , RW dan RT. Pada pelayanan administrasi kependudukan, aparat pemerintah dan nonpemerintah memberikan pelayanan misalnya pengurusan izin nikah, permohonan KTP, surat keterangan, dan kartu keluarga, dan surat-surat kependudukan yang lain.

Definisi Dokumen Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dokumen Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian yaitu, deskriptif analisis.

Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Nawawi (2005:63), mengemukakan bahwa :

Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Surakhmad (2004:133) yang mengemukakan sebagai berikut :

Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode

penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasikan, penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik interview, angket, observasi atau dengan teknik test, studi kasus, studi komparative, studi waktu dan gerak analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2012: 156), adalah “Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan”.

2. Wawancara

Menurut Arikunto (2012:156), bahwa: “Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2012: 158), adalah “Dokumentasi merupakan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Notulen, agenda dan sebagainya”. Data untuk melengkapi penelitian berasal dari sumber tertulis, gambar

(foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2010: 195).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Analisa dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2010: 70), yaitu sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

c) Display Data

d) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. yang dilaksanakan penelitiannya sejak diterbitkan SK Bimbingan pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 dengan melakukan kegiatan wawancara dan pengambilan data sekunder berupa profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, Visi dan Misi, Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Terkait penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran peneliti menggunakan 4 (empat) variabel implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* ini dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Mulyadi 2018:68), yaitu:

1) Komunikasi, dengan indikator;

a) Transmisi.

Adanya penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

b) Kejelasan.

Adanya komunikasi yang di terima atau disampaikan oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

2) Sumber daya, dengan indikator;

a) Sumber daya manusia.

Kecukupan sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Sumber daya fasilitas.

Adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)

3) Disposisi, dengan indikator;

a) Pengangkatan birokrat.

Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang bisa memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Insentif,

Pemberian insentif untuk memotivasi kinerja.

4) Struktur birokrasi, dengan indikator;

a) *Standard operational procedure* (SOP)

Adanya sebuah prosedur- rosedur kerja ukuran dasarnya.

b) Fragmentasi.

Adannya pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda

Dari keseluruhan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut:

a. Pada dimensi komunikasi sudah berjalan optimal dengan indikator transmisi dan indikator kejelasan sudah berjalan dengan optimal.

- b. Pada dimensi sumber daya sudah berjalan dilihat dari indikator sumber daya peralatan yang sudah baik, akan tetapi belum optimal dilihat dari indikator sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik.
- c. Pada dimensi disposisi sudah berjalan dilihat dari indikator pengangkatan birokrat yang sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dilihat dari indikator insentif yang belum berjalan dengan baik.
- Pada dimensi struktur birokrasi sudah berjalan dilihat dari indikator *Standard operational procedure* (SOP) sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dilihat dari indikator *fregmentasi* yang belum berjalan dengan baik.
- Sipil Kabupaten Pangandaran yaitu, penyerapan anggaran dana karena banyaknya program yang belum terlaksana, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yaitu; meningkatkan kinerja sehingga program dapat terlaksana semua sehingga penyerapan anggaran dana bisa lebih optimal, penambahan pegawai dengan mekanisme dan SOP yang ketat, sehingga kualitas sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran lebih baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan yaitu:

Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti pada dimensi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hambatan yang dihadapi Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahab Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Hadari Nawawi.2005.Penelitian Terapan.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Mulyadi, Deddy, 2018, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cetakan III, Alfabeta, Bandung.
- Sudjarwo. 2004. Konsep Administrasi Kependudukan. Jakarta: PT. Widiasarana

- Sugiyono (2015). Metode Penelitian
Kombinasi (Mix Methods).
Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas UU Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah